

Kirim Mahasiswa KKN, UGM Menghadirkan Negara di Perbatasan

Thursday, 02 Juli 2015 WIB, Oleh: Gusti



YOGYAKARTA - Universitas Gadjah Mada menerjunkan sebanyak 6.559 mahasiswa yang mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM). Ribuan mahasiswa ini akan disebar di 27 provinsi dan 106 kab/kota di seluruh pelosok Indonesia selama dua bulan bergabung dengan masyarakat.

Rektor UGM Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., mengatakan program kuliah kerja nyata merupakan kegiatan yang sudah berlangsung sejak lama, dimulai tahun 1971, "Sudah 40 tahun lebih," kata Rektor saat acara pengarahan dan pelepasan di lapangan Grha Sabha Pramana, Selasa (1/7).

Program KKN ini, kata Rektor, di Universitas Gadjah Mada sudah menjadi mata kuliah wajib yang harus diikuti seluruh mahasiswa sebelum lulus. Meski begitu, pemilihan tema program kegiatan tidak dilakukan sembarang namun berdasarkan hasil riset. "Sejak 2006 melakukan KKN PPM berdasarkan tema misalnya ada program khusus pemberantas buta aksara atau mitigasi bencana," katanya.

Tidak hanya itu, di lokasi KKN yang sama tema kegiatan bisa dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun. "Semua dilakukan untuk pendalaman agar bisa mengatasi masalah sosial di sana, tidak cukup hanya dua bulan," ujarnya.

Rektor mengatakan ada beberapa tim mahasiswa juga ditempatkan di daerah perbatasan seperti di Entikong, Kalimantan Barat dan Atambua, NTT. "Di Atambua mereka melakukan kegiatan resolusi

konflik. Demikian juga di Kalimantan utara serta daerah perbatasan dengan Singapura," tegasnya.

Dirjen Cipta Karya, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Andreas Suhono, mengatakan pengiriman mahasiswa KKN PPM UGM di daerah perbatasan diharapkan bisa memberikan manfaat bagi warga sekitar karena mahasiswa diharapkan bisa melakukan pengenalan pengetahuan baru dan inovasi teknologi tepat guna. "Dengan begitu, negara pun bisa hadir di perbatasan dalam keikutsertaan mahasiswa KKN ini," paparnya.

Menteri Sosial RI Khofifah Indah Parawansa mengatakan ada berbagai macam persoalan sosial di daerah perbatasan, diantaranya masih adanya kultur anak yang dinikahkan masih usia dini, bahkan ada yang dinikahkan tanpa dicatatkan resmi ke negara, "Akhirnya anak-anak tidak memiliki akte kelahiran, di Indonesia ada 41 juta anak belum punya akte kelahiran, salah satunya akibat perwakinan tidak dicatatkan sehingga anaknya sulit dapat akte kelahiran," ungkapnya.

Persoalan lain juga dihadapi masyarakat perbatasan, kata Mensos, adalah kebingungan dalam hal urusan jual beli dengan wilayah negara tetangga. "Di Entikong, mereka punya karet yang harga lebih murah, tidak bisa jual ke negara tetangga. Bahkan gula putih lebih mahal ketimbang dengan negeri tetangga, mereka harus tahu ada regulasi (tata niaga)," katanya.

Perbedaan kultur masyarakat perbatasan menurut mensos bisa menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa. "Hal seperti ini pembelajaran yang luar biasa. *homesick* kalian saat pertama datang akan sirna saat mengenali Indonesia yang sesungguhnya dan sungguh luar biasa," katanya.

Seperti diketahui para mahasiswa KKN PPM UGM yang diterjunkan ini ditempatkan di Maluku, Maluku utara, Papua, Papua Barat, Sumatera, Kalimantan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY, Sulawesi, Jawa Barat, NTB, NTT, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Bali, dan Jawa Timur. Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini tidak hanya berasal dari UGM, Program KKN PPM UGM juga diikuti 24 mahasiswa asing UGM dan 49 mahasiswa dari luar negeri. Beberapa Universitas yang mengikutkan mahasiswanya dalam kegiatan ini diantaranya Universitas Teknologi Malaysia, Hanseo University Korea, Shizuoka University, Aoyama Gakuin University, Ibaraki University, Queensland University dan Lehigh University.

Dalam kesempatan yang sama Rektor dan Mensos juga menyaksikan peluncuran program Buku untuk Negeri. Sebanyak 25.520 buku dibagikan gratis ke berbagai lokasi kegiatan KKN PPM UGM. (Humas UGM/Gusti Grehenson)

Berita Terkait

- [UGM dan 9 Perguruan Tinggi Inisiasi Forum Perguruan Tinggi untuk Perbatasan Negara](#)
- [Perguruan Tinggi Prihatinkan Maraknya Konflik di Kawasan Perbatasan](#)
- [27 Daerah Perbatasan Masih Tertinggal](#)
- [Pengembangan Kawasan Perbatasan Darat Hadapi Banyak Tantangan](#)
- [Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat Indonesia-Timor Leste Harus Kedepankan Jalan Damai](#)